

PROSIDING

LOKAKARYA PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN JAWA TIMUR

aan
Timur



DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KARANGPLOSO
2000

PROSIDING

Lokakarya Penyusunan Prioritas Program Dan Perencanaan Strategis Pembangunan Pertanian Jawa Timur

Penyunting:

Ir. Arry Supriyanto, MS.

Ir. M. Cholil Mahfud, MS.

Penyunting Pelaksana:

Drs. Martinus Sugiyarto, MP

Dra. Endang Widajati

Budi Santosa

Suwandoyo



DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KARANGPLOSO
2000

[Handwritten signature]
6/11/2000

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Jawa Timur	iii
Rumusan Lokakarya	vii
Daftar Isi	x
Laporan Ketua Panitia Penyelenggara	xii
Arah, Strategi dan Model Pembangunan Pertanian Jawa Timur di Masa Depan <i>Kabul Santoso, Soetrisno dan Jani Januar</i>	1
Optimasi Pemberdayaan Sumberdaya Alam Pertanian dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Bappeda Jawa Timur</i>	18
Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dalam Rangka Otonomi Daerah <i>Effendi Pasandaran</i>	27
Arah dan Kebijaksanaan Balitbangda Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Jawa Timur <i>Balitbangda Jatim</i>	52
Strategi Perakitan dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi di Jawa Timur <i>Suyamto H</i>	62
Optimasi Potensi Lestari Sumberdaya dalam Mendukung Pembangunan Perikanan di Jawa Timur <i>Wiadnya, D.G.R; Sutjipto, D.D.; Murachman, Purwodajjanto</i>	76
Reorientasi Program dan Kebijaksanaan Pembangunan Perikanan Mendukung Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Dinas Perikanan Jawa Timur</i>	102
Reorientasi Program dan Kebijaksanaan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Diperta Tingkat I Propinsi Jawa Timur</i>	110

Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Peternakan Mendukung Otonomi Daerah di Jawa Timur <i>Padang Bambang Wirjono, Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur</i>	123
Pengembangan Sistem Kediriian Ekonomi Pedesaan <i>Hidayat Nataatmadja</i>	135
Peran LSM Dalam Mendukung Akslerasi Pembangunan Pertanian di Jawa Tumur <i>Hesti R. Wijaya</i>	139
DAFTAR PESERTA	155

LAPORAN KETUA PANITIA PENYELENGGARA

Yang terhormat, Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur,
Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Jawa Timur
Yang terhormat, Ibu Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur
Bapak, Ibu dan hadirin peserta lokakarya yang kami hormati.

***Assalammualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
selamat beraba hagia bagi yang beragama selain Islam.***

Pertama-tama marilah kita secara bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan nikmat dan ridloNYA semata pada siang hari ini kita diberi kesempatan berkumpul untuk melaksanakan serangkaian acara Lokakarya Penyusunan Prioritas Program dan Perencanaan Strategis Pembangunan Pertanian Jawa Timur. Selanjutnya perkenankanlah kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta.

Bapak Gubernur, Bapak Kepala Diperta, Ibu Kepala Kanwil, dan hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan yang baik ini perlu kami laporkan bahwa lokakarya ini diselenggarakan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso, Malang selama 2 (dua) hari, pada tanggal 7 sampai dengan 8 bulan Maret tahun 2000, di Hotel Cendana Jalan Kombes. M. Durijat nomor 6 Surabaya. Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk menyusun prioritas program dan perencanaan strategis pembangunan pertanian menyongsong otonomi daerah Propinsi Jawa Timur, yang akan membahas 11 (sebelas) judul makalah terdiri atas:

1. Arah, Strategi dan Model Pembangunan Pertanian Jawa Timur di Masa Depan
2. Optimasi Pemberdayaan Sumberdaya Alam Pertanian Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Jawa Timur
3. Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dalam Rangka Otonomi Daerah
4. Arah dan Kebijaksanaan Balitbangda dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Di Jawa Timur

5. Strategi Perakitan dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi di Jawa Timur
6. Optimasi Potensi Lestari Sumberdaya Alam Perikanan Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Jawa Timur
7. Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Perikanan Mendukung Otonomi Daerah Jawa Timur
8. Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Mendukung Otonomi Daerah Jawa Timur
9. Reorientasi Program dan Kebijakan Pembangunan Peternakan Mendukung Otonomi Daerah Jawa Timur I
10. Pengembangan Sistem Kedirian Ekonomi Pedesaan
11. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Pertanian di Jawa Timur

Bapak, ibu serta hadirin yang kami hormati

Lokakarya kali ini diikuti oleh 66 peserta yang berasal dari :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
2. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi,
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur,
4. Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur,
5. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur,
6. Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur,
7. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian,
8. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat,
9. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao,
10. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia,
11. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso,
12. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Jawa Timur,
13. Beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa Timur
14. Lembaga Swadaya Masyarakat,
15. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Propinsi Jawa Timur dan
16. Kontak Tani Nasional Andalan (KTNA)

Dengan segala kerendahan hati kami segenap panitia pelaksana mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta bapak, ibu dalam lokakarya ini, sekaligus kami mohon maaf apabila selama pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya lokakarya ini.

Kami berharap mudah-mudahan hasil dari lokakarya ini dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengambil kebijaksanaan dalam rangka menyusun prioritas program dan perencanaan strategi pembangunan pertanian untuk memadukan langkah guna menyongsong otonomi daerah Propinsi Jawa Timur .

Akhirnya kami mohon kepada Bapak Imam Utomo, selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur memberikan pengarahan sekaligus membuka lokakarya ini secara resmi.

***Sekian terima kasih
Wassalammualaikum warohmatullahi
wabarokatuh.***

Maret, 2000

Panitia Pelaksana

**REORIENTASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA Mendukung Otonomi Daerah
DI JAWA TIMUR**

Diperta Tingkat I Propinsi Jawa Timur

PENDAHULUAN

Pada saat ini, paradigma baru dalam pembangunan pertanian didasarkan atas beberapa faktor kritikal, yaitu : *Pertama*, agenda pembangunan ekonomi nasional telah menempatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan dan basis kekuatan ekonomi nasional, *Kedua*, pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola sumberdaya alam dan hayati secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani, *Ketiga*, pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah dan pemerataan pembangunan, *Keempat*, peran pemerintah dalam pembangunan pertanian semakin terbatas pada memfasilitasi dan memberdayakan setiap pelaku pembangunan agar mampu melaksanakan kegiatan ekonominya secara mandiri.

Dengan perubahan pola pikir atau paradigma, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian sehingga sasaran pembangunan pertanian dapat dicapai secara optimal. Dasar pemikirannya adalah bagaimana mengantisipasi kebijakan yang harus ditempuh dalam pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi dinamika otonomi daerah, desentralisasi dan juga globalisasi agar dapat melaksanakan misinya dengan efektif dan efisien.

Perubahan sosial, ekonomi dan politik merupakan kejadian yang saling ter-kait dan saling mempengaruhi. Perubahan dilingkungan internasional telah memberi-kan berbagai hipotesis, antara lain : (1). bahwa ekonomi merupakan kekuatan baru yang sangat menentukan dalam politik internasional, karena keterpurukkan beberapa negara selalu dimulai dengan memburuknya perekonomiannya, (2). ketersediaan dan kecukupan pangan merupakan indikator penting tentang stabilitas ekonomi dan politik. Instabilitas politik menjadi sangat rawan dalam situasi ketahanan pangan yang rendah, dan (3). globalisasi, ternyata tidak selalu menciptakan peluang tetapi juga kendala akses yang dialami oleh

negara-negara yang belum siap masuk ke era globalisasi. Kondisi ini bertambah parah karena terjadi regionalisasi perekonomian seperti Uni Eropa, NAFTA, APEC, AFTA dan lain-lain dan munculnya bentuk proteksi baru yang legal dalam aturan perdagangan internasional tetapi merupakan pembatas dari segi teknis bagi negara-negara sedang berkembang. Standard kualitas yang sangat tinggi ditetapkan oleh negara-negara pengimpor produk pertanian, masalah buruh, hak asasi manusia, lingkungan hidup menjadi bagian yang dipersyaratkan dalam perdagangan internasional.

ANTISIPASI KEBIJAKAN DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH

Dalam menyongsong dilaksanakannya Otonomi Daerah dan Globalisasi Perekonomian yang diduga akan terjadi perubahan dalam kondisi sosial secara global sebagai akibat diberlakukannya perdagangan bebas dipasar global melalui kesepakatan AFTA, APEC dan WTO, maka program pembangunan tanaman pangan dan hortikultura perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diarahkan kepada peningkatan produktifitas, kualitas produk, efisiensi usaha sehingga tercipta harga produk yang kompetitif.

A. Reorientasi Arah Kebijakan

1. *Visi pembangunan pertanian* adalah adalah terciptanya pertanian modern, tangguh dan efisien.
2. *Misi pembangunan pertanian* adalah pemberdayaan petani menuju masyarakat yang modern, maju sejahtera dan berkeadilan.
3. *Strategi pembangunan pertanian* adalah:
 - Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya domestik yang meliputi lahan , air, plasma nutfah, tenaga kerja, modal dan teknologi.
 - Diversifikasi usahatani dan produksi pertanian dengan memanfaatkan keanekaragaman sumberdaya, teknologi, produk hulu dan hilir.

- Penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi untuk meningkatkan efisiensi dan keunggulan produk wilayah.
- Peningkatan efisiensi sistem agribisnis untuk menciptakan produk pertanian yang berdaya saing tinggi, dengan memanfaatkan IPTEK.

Program Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura masa yang akan datang diarahkan untuk lebih memberdayakan dan memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan yang tercermin dalam Undang Undang No. 22 / 1999 dan No. 25 / 1999, dengan menerapkan perubahan-perubahan :

1. *Orientasi Pembangunan*, dari pendekatan produksi menjadi peningkatan dan kesejahteraan petani.
2. *Pengembangan Produk*, dari menghasilkan produk pertanian primer kepada produk olahan yang dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, melalui pengembangan agribisnis di pedesaan.
3. *Pemilihan Teknologi*, dari teknologi padat karya kearah teknologi relatif padat modal, seperti bioteknologi dan mekanisasi pertanian, dalam upaya mencapai efisiensi dan daya saing komoditas pertanian.
4. *Pengelolaan Pembangunan*, dari dominasi perencanaan dan penganggaran terpusat kepada desentralisasi, untuk menjamin proses pembangunan secara lebih partisipatif, mengakomodasikan aspirasi lokal, dan menampilkan keunggulan sumberdaya lokal.
5. *Peran dalam Pelaksanaan Pembangunan*, dari dominasi pemerintah kepada peran masyarakat dan swasta. Peran pemerintah semakin ditekankan pada fungsi fasilitasi dan penciptaan kondisi kondusif bagi pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat.
6. *Peran Pengawasan Pembangunan*, dari dominasi pemerintah ke arah peran pengawasan masyarakat yang lebih besar, yang menuntut transparansi, keterbukaan dan kejujuran.

Mengacu pada perubahan tersebut dan memahami kondisi negara masih dalam upaya pemulihan krisis ekonomi, maka pembangunan tanaman pangan

dan hortikultura diarahkan pada 4 (empat) aspek pokok, yaitu : (a). Peningkatan Ketahanan Pangan, (b). Peningkatan dan Pengembangan Agribisnis, (c). Pemberdayaan Ekonomi rakyat/petani, dan (d). Peningkatan produksi yang berdaya saing kuat bagi komoditas ekspor.

Keempat fokus tersebut saling terkait dengan pengertian bahwa upaya-upaya mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan komoditas ekspor dilakukan melalui pengembangan agribisnis dengan asas manfaat bagi pemberdayaan ekonomi petani.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan perubahan orientasi pembangunan maka program pembangunan tanaman pangan dan hortikultura diarahkan kepada :

1. Memposisikan kembali sektor pertanian umumnya dan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura khususnya sebagai mesin penggerak pembangunan ekonomi nasional maupun daerah untuk mendukung tumbuh kembangnya sektor ekonomi lainnya.
2. Menempatkan keberpihakan kepada petani untuk membudayakan masyarakat tani sebagai subyek pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
3. Mengoperasionalkan Sistem Agribisnis sebagai suatu pendekatan pembangunan agar terwujud keterpaduan dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian wilayah.

B. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan persaingan global, Pemerintah memberikan Otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman Daerah. Untuk inilah Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang

No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada dasarnya ditujukan. Fenomena tuntutan otonomi yang seluas-luasnya dari Pemerintah Daerah, jelas membawa konsekuensi perlunya disempurnakan sistem pemerintahan antara lain batasan kewenangan urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Masing-masing daerah berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain. Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999, yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah integritas identitas nasional, skala pelayanan nasional, teknologi tinggi strategis. Kewenangan tersebut dijabarkan dalam fungsi manajemen pembangunan pertanian yang dalam penyelenggaraannya dikelompokkan kedalam beberapa jenis kewenangan, yaitu:

1. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan pertanian;
2. Pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam hayati, termasuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, rehabilitasi dan konservasi;
3. Pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
4. Pembinaan dan pengembangan usaha pertanian;
5. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
6. Penelitian dan pengembangan IPTEK pertanian;
7. Pembinaan dan pengembangan keamanan dan ketahanan pangan nasional;
8. Standarisasi pertanian;
9. Pengelolaan dan pelayanan informasi pertanian dalam rangka mendukung modernisasi pembangunan pertanian.

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang Undang No. 22 tahun 1999 mencakup kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan

bidang pemerintahan tertentu lainnya, termasuk kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah tertentu lainnya adalah:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro;
2. Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumberdaya manusia potensial dan penelitian yang mencakup wilayah propinsi;
3. Pengelolaan pelabuhan regional;
4. Pengendalian lingkungan hidup;
5. Promosi dagang dan budaya / pariwisata;
6. Penanganan penyakit menular dan hama tanaman;
7. Perencanaan tata ruang propinsi.

Berdasarkan Pasal. 11 Undang-Undang No. 22 tahun 1999, kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal. 7 dan yang diatur dalam Pasal. 9 Undang-Undang tersebut di atas. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja.

PROGRAM PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DALAM Mendukung OTONOMI DAERAH

Sesuai dengan semangat Otonomi daerah atau desentralisasi, maka penyusunan program pembangunan diserahkan kepada masing-masing daerah dengan memperhatikan potensi dan kondisi sumberdaya yang ada, komoditas unggulan yang akan dikembangkan, ketersediaan infrastruktur dan prospek pemasaran baik domestik maupun global.

Prioritas utama dalam pembangunan tanaman pangan dan hortikultura difokuskan kepada dua aspek pokok, yaitu : Kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan serta pengembangan agribisnis.

Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu pada tingkat harga yang terjangkau. Pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi sumberdaya manusia suatu bangsa, pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan merupakan komponen utama ketahanan nasional.

Ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pengadaannya. Dalam kaitan ini upaya pokok untuk meningkatkan ketahanan pangan antara lain meliputi:

1. Peningkatan produksi beras untuk meraih kembali swasembada beras secara nasional.
2. Peningkatan produksi palawija khususnya jagung dan kedelai untuk menunjang pengembangan industri pengolahan pangan sumber protein nabati dan industri pakan domestik.
3. Peningkatan produksi komoditas hortikultura utama untuk meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
4. Peningkatan pengembangan pakan lokal pada masing-masing wilayah dan pengembangan kemampuan masyarakat dalam pengolahan pangan untuk mempercepat diversifikasi pangan.

A. Ketahanan Pangan Nasional

Sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan maka dilaksanakan upaya peningkatan produksi Padi, Kedelai dan Jagung (Gema Palagung 2001) dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Upaya Peningkatan Produktifitas

- Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu secara meluas dengan didukung penyediaan benih secara tepat.
- Peningkatan populasi tanaman dengan memasyarakatkan cara tanam jajar legowo.
- Memasyarakatkan penggunaan pupuk alternatif.

Sebagai antisipasi kelangkaan pupuk dan kenaikan harga pupuk anorganik disamping untuk memperbaiki struktur dan fisik tanah sebagai akibat

rendahnya bahan organik tanah. Untuk itu telah dikembangkan pupuk Bokashi di beberapa daerah dimana dari hasil Demplot menunjukkan bahwa penggunaan pupuk Bokashi dapat menekan biaya produksi sebesar Rp. 183.792,00 untuk tanaman padi dan sebesar Rp. 114.562,00 untuk tanaman kedelai. Disamping itu dapat meningkatkan produksi Padi sebesar 0,73 Ton/Ha/GKG dan Kedelai sebesar 0,29 Ton/Ha/Ose. Pada saat ini pula telah dikembangkan beberapa jenis pupuk alternatif dengan metoda Dem Area Padi Sawah seluas 50 Hektar di Sidoarjo dan saat ini pula telah dikembangkan di 20 Kabupaten dengan metoda yang sama.

2. Upaya Perluasan Areal Tanam

Kebijakan perluasan areal tanaman komoditas pangan dimaksudkan untuk:

- Mengantisipasi tidak tercapainya sasaran produktifitas karena rendahnya penggunaan input sebagai akibat rendahnya daya beli petani dan tidak tercapainya peningkatan mutu intensifikasi.
- Memanfaatkan secara optimal potensi lahan yang ada, seperti lahan sawah hujan, lahan kering dan lahan tidur.

Kegiatan perluasan areal tanam dilaksanakan melalui cara sebagai berikut:

- Peningkatan Indeks Pertanaman (IP), baik dari IP 100 menjadi IP 200, maupun dari IP 200 menjadi IP 300 pada lahan sawah tadah hujan dan lahan kering.
- Pemanfaatan lahan tidur dan lahan kering.
- Penggunaan mekanisasi pertanian untuk mempercepat pengolahan tanah, pompanisasi dan kegiatan panen/pasca panen melalui pola pengembangan kelompok usaha jasa Alsin (UPJA).

3. Upaya Pengamanan Produksi

Upaya pengamanan produksi pangan dimaksudkan sebagai tindakan untuk mengurangi resiko kerusakan dan penurunan produksi akibat kondisi pra-panen yang kurang mendukung seperti serangan OPT, kekeringan dll. Langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka pengamanan produksi pangan adalah :

- Pergiliran Varietas
- Penerapan Pola Tanam Serentak, yang akhir-akhir ini dirasakan semakin menurun karena berbagai faktor seperti keterbatasan tenaga kerja, kekurangan air dan lain-lain.
- Melaksanakan gerakan hemat air sehingga dapat terjamin ketersediaan air.
- Melaksanakan revitalisasi HIPPA agar mampu mengelola air dengan melaksanakan perbaikan jaringan air irigasi di tingkat usahatani.
- Peningkatan perlindungan tanaman untuk mengantisipasi dan mengendalikan serangan OPT sekaligus meminimalkan kerusakan atau penurunan produksi akibat serangan OPT tersebut.

4. Upaya Penyelamatan Hasil, ditempuh melalui :

- Pemasyarakatan penggunaan Alsin panen dan pasca panen untuk menurunkan tingkat kehilangan hasil dan meningkatkan kualitas produk.
- Pemasyarakatan lumbung pangan di pedesaan.

5. Peningkatan Produksi Hortikultura

Peningkatan produksi hortikultura diarahkan kepada komoditas sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat unggulan yaitu komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, mempunyai peluang pasar baik domestik maupun global, mempunyai potensi produksi tinggi dan mempunyai peluang pengembangan teknologi, seperti mangga, pisang, jeruk, cabe, bawang merah, anggrek dan jahe.

Upaya pengembangan komoditas hortikultura diarahkan pada kegiatan

- Penumbuhan sentra Agribisnis Hortikultura, yaitu memperluas areal tanaman hortikultura pada wilayah/kawasan yang memenuhi skala ekonomi serta memungkinkan berkembangnya usaha Agribisnis/ Agroindustri (\pm 500 ha).
- Pemanfaatan lahan tidur potensial.
- Memanfaatkan kebun-kebun terlantar.

6. Pemanfaatan Sentra Hortikultura

Diwujudkan dalam bentuk pembinaan sentra-sentra produksi yang sudah ada dengan pendekatan Agribisnis sehingga produktifitas, kualitas produk meningkat dan memiliki daya saing dalam pemasaran.

- Pemanfaatan sentra sayuran, melalui pengembangan varietas unggul bermutu, pemupukan berimbang, pengembangan standard mutu sayuran, teknologi kemasan, informasi pasar dan pengembangan jaringan komoditas.
- Pemantapan sentra-sentra buah-buahan dengan perbaikan aspek pra panen, pasca panen dan kelembagaan.
- Pemantapan sentra tanaman hias dan tanaman obat.

B. Peningkatan dan Pengembangan Agribisnis

Sistem Agribisnis adalah suatu sistem dengan rangkaian dari berbagai sub-sistem mulai dari sub-sistem penyediaan prasarana dan sarana produksi termasuk industri perbenihan yang tangguh, sub-sistem budidaya yang menghasilkan produk pertanian, sub-sistem industri pengolahan atau agroindustri, sub-sistem pemasaran dan distribusi, serta sub-sistem jasa pendukungnya.

Sistem agribisnis jauh lebih luas daripada sektor pertanian yang dikenal selama ini. Sistem Agribisnis terdiri dari tiga sub-sistem utama, yaitu : *Pertama*, sub-sistem agribisnis hulu yang merupakan kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian, seperti industri dan perdagangan agrokimia (pupuk, pestisida, dll), industri agro-otomotif (mesin dan peralatan), dan industri benih. *Kedua*, sub-sistem usahatani yang merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh sub-sistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Termasuk kedalam subsitem usahatani ini adalah usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat-obatan, usaha perkebunan, usaha perikanan, usaha peternakan dan kehutanan. *Ketiga*, sub-sistem agribisnis hilir yang berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam sub-

sistem agribisnis hilir ini antara lain adalah industri pengolahan makanan, industri pengolahan minuman, industri pakan ternak, industri jasa boga, industri farmasi dan bahan kecantikan, dan lain-lain beserta kegiatan perdagangannya. Disamping ketiga sub-sistem di atas, diperlukan sub-sistem keempat sebagai bagian dari pembangunan sistem agribisnis. Sub-sistem *keempat* ini dikenal sebagai subsistem penunjang. Sub-sistem penunjang adalah seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga transportasi, lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah (kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, kebijakan tata ruang, serta kebijakan lainnya).

Program pengembangan agribisnis diarahkan kepada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan kelembagaan petani dalam penyediaan agro input

Pada kelompok tani ditumbuhkan unit-unit usaha penyedia agroinput bagi anggota maupun petani sekitarnya, meliputi usaha penangkaran untuk penyedia benih unggul bermutu, usaha kios saprotan sebagai penyedia pupuk, pestisida, unit usaha penyedia alsintan dan unit usaha lainnya.

2. Pengembangan Usaha Pemasaran

Pengembangan usaha pemasaran diarahkan untuk meningkatkan posisi petani dalam pembentukan harga, melalui :

- 2.1. Pemantapan kelembagaan ditingkat petani yang dapat mengakomodasikan kepentingan petani, baik untuk kepentingan pemasaran, informasi maupun permodalan petani.
- 2.2. Menciptakan suatu sistem pelayanan informasi pasar yang lengkap dan luas jaringannya dengan metoda yang lebih cepat dan akurat.
- 2.3. Menciptakan iklim kondusif untuk penumbuhan dan pengembangan lembaga pemasaran yang keanggotaannya berbasis pada petani, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh petani.

3. Pengembangan Usaha Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pengembangan usaha pasca panen dan pengolahan hasil diarahkan untuk menyelamatkan produksi melalui gerakan penerapan teknologi pasca panen guna menjamin agar produksi yang telah dicapai terhindar dari kehilangan (losses), baik kehilangan pada waktu panen maupun pasca panen.

Usaha ini ditempuh melalui :

- 3.1. Penerapan teknologi pasca panen yang tepat.
- 3.2. Penyebar luasan penggunaan peralatan pasca panen melalui usaha pelayanan jasa Alsintan (UPJA).
- 3.3. Peningkatan efisiensi pengolahan hasil (peningkatan rendemen) melalui rehabilitasi penggilingan padi.

4. Meningkatkan Peranan Kemitraan Usaha

Di dalam kemitraan usaha terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu perusahaan dan petani sebagai pelaku aktif serta pihak pemerintah sebagai aktivator, dinamisator, dan stabilisator.

Peranan masing-masing pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

- Menciptakan iklim usaha yang mampu mendorong berkembangnya kemitraan usaha, serta menyiapkan peraturan-peraturan kebijaksanaan dan perkreditan, pajak dan sebagainya.
- Sebagai penengah bila terjadi perselisihan.
- Sebagai pembina dan motivator, baik terhadap petani maupun terhadap perusahaan.

2. Perusahaan

- Sebagai penyedia modal, baik yang berupa sarana produksi yang diperlukan untuk melaksanakan usaha tani maupun modal untuk pengolahan tanah.
- Sebagai pembimbing petani dalam melaksanakan usahatani.

- Menyediakan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan usahatani.
- Menjamin/menampung hasil dengan harga yang wajar.

3. Petani.

- Menerapkan rekomendasi teknologi dalam usahatani.
- Memanfaatkan modal, teknologi dan sarana produksi seoptimal mungkin.
- Menyiapkan hasil pertanian sesuai mutu yang disepakati.
- Menjual hasil pertanian dengan harga kesepakatan.

PENUTUP

Demikian makalah ini disajikan sebagai salah satu sumbang saran pemikiran dalam menghadapi otonomi daerah dan sekaligus menyongsong globalisasi perekonomian. Kedua hal tersebut memerlukan antisipasi kita bersama untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam program pembangunan tanaman pangan dan hortikultura.

Penyesuaian program tersebut diperlukan karena dengan diberlakukannya otonomi daerah dan menyongsong globalisasi perekonomian, dipastikan terjadi perubahan sosial, ekonomi dan politik yang memerlukan kesiapan kita semua baik secara struktural maupun fungsional.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR HADIR

No	Nama	Instansi
1.	A. Latief Abadi	FP. Unibraw
2.	Achmadi	KTNA Lamongan
3.	Agus Sugiyatno	IPPTP Tlekung
4.	Agus Suryadi	BPTP Karangploso
5.	Anang Triwiratno	IPPTP Tlekung
6.	Arry Supriyanto	IPPTP Tlekung
7.	Balitbangda Jatim	Balitbangda Tk. Prop. Jatim
8.	Bambang Pamudji	IPPTP Wonocolo
9.	Bambang Siswanto	IPPTP Wonocolo
10.	Bangun Nusantoro	BPTP Karangploso
11.	Bappeda	Bappeda Tk. I Prop. Jatim
12.	Baswarsiati	BPTP Karangploso
13.	Budi Santosa	BPTP Karangploso
14.	Damat	FP Unmuh Malang
15.	Didik Budi Wijono	IPPTP Grati
16.	Didik Sulistyanto	Lemlit Univ. Jember
17.	Dini Hardini	BPTP Karangploso
18.	Diperta Pangan Daerah	Diperta Pangan Daerah Tk. I Jatim
19.	Djoma'ijah	IPPTP Tlekung
20.	Dwi Setyorini	BPTP Karangploso
21.	Eddy Purnomo	IPPT Wonocolo
22.	Effendi Pasandaran	P4 Badan Litbang Pertanian
23.	Endah Retnaningtyas	BPTP Karangploso
24.	F. Kasijadi	BPTP Karangploso
25.	Forita Dyah Arianti	BPTP Ungaran
26.	Gatot Subiyanto	BIPP Lamongan
27.	Gunawan Sukarso	P3GI Pasuruan
28.	Hendarto	Kanwil BRI
29.	Hendri Arianto	IPPTP Tlekung
30.	Heru Sudarsono	BPTP Karangploso
31.	Hesti R. Wijaya	Yayasan Pengembangan Pedesaan (LSM)
32.	Hidayat Nataatmadja	PSE Bogor

- | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------------|
| 33. | HM. Kadir Rasyidi | KTNA Tk. I Jatim |
| 34. | I Made Rai Yasa | IPPTP Denpasar |
| 35. | I.G.A.K. Sudarmaja | IPPTP Denpasar |
| 36. | Iffah Irsjadina | BPTP Karangploso |
| 37. | Kabul Santoso | Universitas Jember |
| 38. | Karimah | BAPPEDA Tk. I Jatim |
| 39. | Kusdiarianto | Diperta Tk. I Jatim |
| 40. | Luki Rosmahani | BPTP Karangploso |
| 41. | Lukman Affandy | IPPTP Grati |
| 42. | M. Ali Yusran | IPPTP Wonocolo |
| 43. | M. Cholil Mahfud | BPTP Karangploso |
| 44. | M. Soleh | BPTP Karangploso |
| 45. | Mochtar Effendy | BIPP Jombang |
| 46. | Muchari | BPTP Lembang |
| 47. | Mutia Erti Devi | IPPTP Tlekung |
| 48. | Nunuk Sunu SW | BLPP Ketindan |
| 49. | Nurul Istiqomah | BPTP Karangploso |
| 50. | Padang Bambang W | Dinas Peternakan Daerah Tk. I Jatim |
| 51. | Pudji Santosa | BPTP Karangploso |
| 52. | Pudjiyanto | Puslit Kopi & Kakao |
| 53. | Pudyantono | Diperta Lamongan |
| 54. | Rina EW | BPTP Karangploso |
| 55. | Roesmiyanto | BPTP Karangploso |
| 56. | Ruly Hardianto | BPTP Karangploso |
| 57. | Sarjana | BPTP Ungaran |
| 58. | Sarwiyono | Faperta Unibraw |
| 59. | Sentot R. Soemarsono | BPTP Karangploso |
| 60. | Siti Hartanti | FP. Univ. Jember |
| 61. | Sjaiful Chanafi | BPTP Karangploso |
| 62. | Soehartono | Diskan Tk. I Jatim |
| 63. | Sri Hartiningsih | BLPP Batu |
| 64. | Sri Prapti | Kanwil Pertanian |
| 65. | Sri Yuniastuti | BPTP Karangploso |
| 66. | Suhardjo | BPTP Karangploso |
| 67. | Suhartono | Dinas Perikanan Daerah Tk. I Jatim |
| 68. | Sukarno Roesmarkam | BPTP Karangploso |

- | | | |
|-----|---------------|------------------|
| 69. | Supangat | BPTP Karangploso |
| 70. | Suprpto | Diperta Jombang |
| 71. | Sutanto JT | IPPTP Wonocolo |
| 72. | Suwandi | IPPTP Wonocolo |
| 73. | Suwarso | Balittas Malang |
| 74. | Suwono | BPTP Karangploso |
| 75. | Suyanto H | BPTP Karangploso |
| 76. | Uum Umiyasih | IPPTP Grati |
| 77. | Wiadnya DGR | Faperta Unibraw |
| 78. | Wigati Istuti | IPPTP Wonocolo |
| 79. | Yoga Ekawati | IPPTP Wonocolo |
| 80. | Yudha Sukardi | IPPTP Wonocolo |